

Rancangan
Renja 2023

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JL. MT. Haryono Telp. (0541) 733621 Fax. (0541) 744917
Website : <https://esdm.kaltimprov.go.id> e-mail : humas@pertambangan.kaltim.go.id
SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : K.050/ 05 /DESDM/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja PD, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008

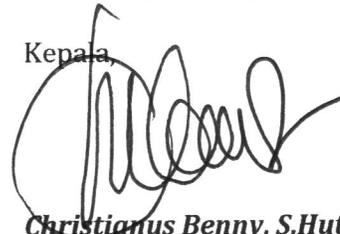
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Tim Pengarah,
bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarahan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan serta substansi pokok naskah Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tim Pelaksana,
bertugas dan bertanggungjawab dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyusunan rancangan Renja PD, penyelarasan rancangan Renja PD dengan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala,



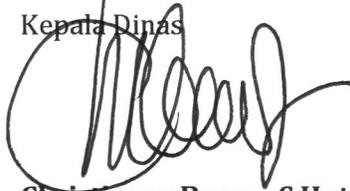
Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19770911 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur
Nomor : K.050/05/DESDM/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
Tanggal : 3 Januari 2022

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : **Christianus Benny, S.Hut. M.H**
Kepala
- II. Koordinator/Pejabat Penghubung : **Christianus Benny, S.Hut. M.H**
Kepala
- III. Ketua : **Eddy Samudra, S.Sos**
Kasubag Perencanaan Program
- IV. Anggota : 1. **Surta Hutahaean, SH**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
2. **Muhdri**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
3. **Elissa Dara Tamara**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
4. **Hesti Novita**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas



Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19770911 200112 1 003

KATA PENGANTAR

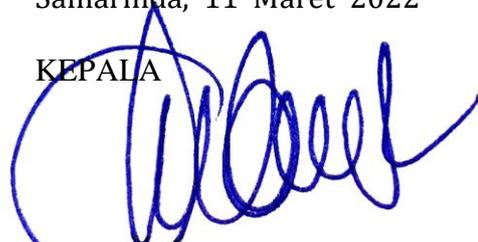
Rancangan Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari rangkaian sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja PD sangat penting peranannya dan turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Renja ini mengacu pada kerangka arahan yang telah dibahas bersama-sama dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah lain dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan merupakan tahap awal dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Dengan tersusunnya Rancangan Renja 2023 ini, diharapkan menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam Rancangan RKPD 2023.

Samarinda, 11 Maret 2022

KEPALA



Christianus Benny, S.Hut. M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19770911 200112 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tufoksi Perangkat Daerah	33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	64
3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	86
BAB V PENUTUP	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Realisasi Program /Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil Keluaran 8
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur 15
Tabel T-C.30	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur 32
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur 45
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 62
Tabel 5	Identifikasi Kebijakan Nasional (bidang urusan ESDM) 58
Tabel 6	Sasaran-Sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 59
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 69
Tabel 4.1	Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan daerah yang meliputi RPJPD 20 tahun, RPJMD 5 tahun, dan RKPD tahunan. Kemudian dinas/badan daerah wajib menjabarkannya ke dalam rencana strategis (renstra) dinas/badan. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Dalam menyusun rancangan awal RPJPD, Bappeda meminta masukan dari Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.

RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja-PD dengan Kepala PD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perangkat Daerah menyusun Renja-PD, Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun sebagai bahan pembahasan dalam beberapa tahapan proses selanjutnya yang meliputi forum Perangkat Daerah, musrenbang RKPD, dan tahap penyempurnaan/sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas;
- Undang-undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55333);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
- Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/002/B.PPEPD-Bapp/2023 Tanggal 03 Januari 2023 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
-

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tujuannya adalah untuk menyelaraskan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan guna pencapaian tujuan/sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dirangkum dalam 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut :

- Bab I : menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan renja meliputi latar belakang perlunya penyusunan renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.
- Bab II : menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- Bab III : menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yang ditetapkan dengan memperhatikan kebijakan nasional dalam sektor energi dan sumberdaya mineral.
- Bab IV : menguraikan rencana kerja dan kerangka pendanaan perangkat daerah.
- Bab V : merupakan bab penutup, berisi catatan penting yang menjadi perhatian dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode perencanaan strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2019-2023. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang tertuang ke dalam 5 program dan 27 kegiatan dan 80 sub kegiatan, strategis dan administratif, secara umum dapat dilaksanakan sesuai rencana, berdasarkan pencapaian target kinerja keluaran masing-masing kegiatan/program, namun ada 4 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan akibat wabah COVID-19 yang melanda Indonesia.

Pelaksanaan program/kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 75.479.895.000 dengan realisasi sebesar Rp. 62.446.288.883 atau sebesar 82.73% terdiri dari :

URAIAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI TAHUN 2021		
		KEUANGAN	FISIK (%)	KEU (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22,164,685,402.00	18,791,116,082.00	85.31	84.78
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	1,949,999,960.00	1,430,449,240.00	88.03	73.36
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	2,225,000,000.00	1,319,969,362.00	70.76	59.32
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	2,219,129,000.00	1,812,325,181.00	82.26	81.67
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	46,921,080,638.00	39,092,429,018.00	92.48	83.32
TOTAL BELANJA	75,479,895,000.00	62,446,288,883.00	92.15	82.73

Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan Tahun 2021 yang mengacu pada indikator kinerja keluaran kegiatan adalah 92.15% sehingga kinerja seluruh kegiatan secara umum dapat dikategorikan Baik.

Rata-rata efisiensi kegiatan yang dilaksanakan dengan pembelanjaan langsung APBD dalam pencapaian target indikator kinerja keluaran dan hasil adalah

89.44% dan rata-rata efisiensi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan adalah 82.73%; dengan demikian pelaksanaan kegiatan secara umum dikategorikan Sangat Efisien.

Tabel 2.1
RATA-RATA REALISASI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MELEBIHI
TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1,135,000	1,136,601	100.14
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	4	4	100.00
Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	4	4	100.00
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	50	100.00
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	50	50	100.00
	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	50	100.00
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	50	50	100.00
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	120	120	100.00
Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik	5	5	100.00
Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	5	5	100.00
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	12	100.00
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang izinv	12	12	100.00
Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	12	12	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	1	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	5,000	5,000	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	1	1	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	1	100.00
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6	6	100.00

Faktor-faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya dan melebihi target kinerja program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 (n-2) disebabkan dari beberapa factor internal dan eksternal. Berikut factor-faktor penyebabnya antara lain :

a. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan

Pertama, Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja program/kegiatan adalah partisipasi Masyarakat telah merespon bentuk akuntabilitas dan transparansi Pemerintah secara langsung dapat dipertanggungjawabkan. Respon tersebut disampaikan dalam dialog langsung kunjungan eksekutif ke lapangan ataupun via dialog interaktif di media elektronik dan dalam bentuk surat tertulis dan media-media lainnya, yang selanjutnya digunakan sebagai feedback dalam kinerja pemerintah.

Responsifitas masyarakat dalam menanggapi program dari pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat yang secara aktif turut serta secara langsung mengawasi progam dan kegiatan pemerintah serta berkontribusi dalam hal-hal memecahkan masalah yang timbul untuk perbaikan kearah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan khususnya Program Rehabilitasi/Reklamasi Lahan Pasca Tambang Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi.

Kedua, ketatnya persyaratan kewajiban Pemerintah yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Disamping itu pula Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas kegiatan penambangan mineral dan batubara

sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 08 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklamasi dan pasca tambang, Perda Nomor 01 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Faktor-faktor penyebab capaian kinerja Program/Kegiatan melebihi target

Realisasi capaian kinerja melebihi target yang direncanakan merupakan suatu indikator keberhasilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur yang sangat membanggakan, hal ini terjadi dikarenakan besarnya partisipasi pelaku swasta dan masyarakat dalam pencapaian realisasi yang melebihi target disebabkan karena seluruh rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM Prov. Kaltim berjalan sesuai rencana, yaitu Pembangunan PLTS off Grid sebanyak 5 Unit diantaranya :

1. Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Desa Enggelam Kec. Muara Wis Kab. Kukar kapasitas 83,16 KWP
2. Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Desa Long Lamcin Kec. Kelay Kab. Berau kapasitas 29,4 KWP
3. Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Desa Rantau Layung Kec. Batu Sopang Kab. Paser kapasitas 33,6 KWP
4. Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid di Desa Tadoan Kec. Sandaran Kab. Kutim kapasitas 58,8 KWP
5. Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Desa Tanjung Soke Kec. Bongan Kab. Kubar kapasitas 29,4 KWP
6. Pembangunan PLTS Terpusat Off-Grid di Dusun Ketibeh Kec. Muara Wis Kab. Kukar kapasitas 47,04 KWP
7. Per Agustus 2021 untuk sistem 150 KV memiliki cadangan disektor pembangkitan sebesar 387,33 MW, namun masih terdapat beberapa sistem isolated (ULD) yang perlu dukungan penambahan pembangkit karena masih devisit atau kurang daya pembangkit.

Selain itu terdapat beberapa tambahan pembangunan yaitu pemasangan sambungan gratis hingga Tahun 2021 pada rumah warga di Kabupaten Kukar yang dilaksanakan melalui dana CSR PT. KPB (perusahaan tambang batubara) diantaranya:

- Desa Loa Duri sebanyak 47 Sambungan Gratis
 - Desa Bakungan sebanyak 31 Sambungan Gratis
 - Desa Batuah sebanyak 64 Sambungan Gratis.
 - Kampung Bekokong Kecamatan Jempang, Kampung Muara Siram, Siram Makmur, Siram Jaya Kecamatan Bongan Kab. Kutai Barat
 - Kecamatan Pulau Derawan Desa Teluk Semanting, Desa Kasai, Kecamatan Batu Putih Desa Tembudan, Kayu Indah, Ampen Medang, Sumber Agung, Kecamatan Tabalar Desa Semurut, Desa Buyung-Buyung, Kecamatan Kelay Desa Sidobangen Kab. Berau
 - Kecamatan Paser Balengkong Desa Sunge Batu, Kecamatan Tanah Grogot Desa Prepat, Desa Sungai Langir, Kecamatan Muara Komam desa Swang Slutung, Kecamatan Long Kali Desa Muara Lambakan, Kecamatan Batu Engau Desa Romu, Desa Liwang, Desa Segendang, Desa Pengguren Jaya Kab. Paser
 - Kecamatan Bengalon Desa Keraitan, Kecamatan Kaubun Desa Cipta Graha, Kecamatan Kaubun Desa Cipta Graha, Kecamatan Karangan Desa Muksti Lestari Kab. Kutai Timur.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Setiap peningkatan pelaksanaan kemitraan pemerintah swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat, maka dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Kontribusi pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan berkontribusi sangat besar bagi keberhasilan

program/kegiatan tersebut. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah di era otonomi daerah ditentukan kemampuan dan kreativitas pemerintah daerah di dalam merumuskan model pembangunan daerah sesuai kewenangannya, melalui pendekatan komunikasi pembangunan dengan seluruh komponen pembangunan di daerah baik pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Model pembangunan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah adalah penerapan pola kemitraan pemerintah-swasta. Hal ini tentunya akan membawa dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur.

Keberadaan swasta yang berinvestasi dalam sektor pertambangan dan energy Provinsi Kalimantan Timur merupakan potensi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi sejak melakukan kemitraan dengan swasta (investor) dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Kemitraan pembangunan daerah tersebut diwujudkan melalui kerjasama pembangunan sarana-saran pembangkit listrik yang menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan bersama berdasarkan skala prioritas kebutuhan pembangunan, dimana masing-masing mitra mengalokasikan sumber daya dalam mendukung kegiatan program. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan program sebagai model pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal dan hasil prakarsa dan inisiatif lokal dalam era desentralisasi dan otonomi daerah dipengaruhi oleh pelaksanaan kemitraan pemerintah-swasta yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Model kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program adalah wujud keberpihakan swasta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawabnya untuk turut serta dalam membangun dan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal selama ini selalu mengandalkan kemampuan sumber daya dan organisasi pemerintah daerah.

Kombinasi kerjasama antara dua lembaga yang berbeda orientasi antara pemerintah daerah dengan swasta (investor) melalui pola kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasarkan pada perbedaan karakteristik dan orientasi kedua organisasi kemitraan ini, dimana pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang memiliki orientasi sosial, sedangkan swasta merupakan organisasi privat yang berorientasi keuntungan (komersial). Kesadaran baru mengenai perlunya dikembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pembangunan pada era persaingan global, bahwa tidak mungkin lagi pemerintah dan swasta berjalan sendiri-sendiri. Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan yang terbatas sementara permasalahan pembangunan yang kompleks memerlukan penanganan yang komprehensif dan memadai, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan kemitraan dengan swasta untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dengan tetap memaksimalkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam pelaksanaan program/kegiatan dipandang sebagai nilai baru dalam pembangunan daerah yang berbasis masyarakat terpencil dan daerah tertinggal serta memberikan pandangan bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam arti formal, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama swasta dan masyarakat. Sinergitas ketiga aktor pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

d. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran

Dalam bidang pemanfaatan energi terbarukan, karena biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, maka diperlukan peran serta Pemerintah dan Swasta

dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.29.001	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.29.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang ESDM	84%	81%	82%	82%	100.00	83%	83%	98.81
3.29.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6	6	6	6	100.00	6	6	100.00
3.29.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP	1	1	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	18	14	16	16	100.00	17	17	94.44

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan SKPD	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi BMD yang diverifikasi	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan bulanan administrasi BMD yang diverifikasi	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	146	0	109	109	100.00	121	121	82.88
3.29.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya	227	0	109	109	100.00	121	121	53.30
3.29.001.1.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pelatihan	60	0	35	5	14.29	25	25	41.67
3.29.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11	11	11	11	100.00	11	11	100.00
3.29.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor	45	0	33	33	100.00	35	35	77.78
3.29.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	120	120	120	120	100.00	120	120	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	144	144	144	144	100.00	144	144	100.00
3.29.001.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material	6	6	6	6	100.00	6	6	100.00
3.29.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu	4140	0	4140	2055	49.64	4140	4140	100.00
3.29.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	24	42	42	100.00	60	60	100.00
3.29.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	42	0	73	73	100.00	73	73	173.81
3.29.001.1.07.006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	73	0	5	5	100.00	42	42	57.53
3.29.001.1.07.010	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	42	0	5	5	100.00	42	42	100.00
3.29.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa kegiatan kantor	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang diadministrasikan	60000	0	5000	5049	100.98	6000	6000	10.00
3.29.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	12	12	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39	0	7	7	100.00	39	39	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.001.1.09.006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	85	0	70	70	100.00	85	85	100.00
3.29.001.1.09.009	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	35	0	35	35	100.00	35	35	100.00
3.29.002	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	38%	0	33%	33%	100.00	35%	38%	100.00
3.29.002.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.01.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah titik pengambilan data	33	0	15	15	100.00	33	33	100.00
3.29.002.1.01.002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah CAT yang dievaluasi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Peta batuan pada CAT	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
		Peta geologi untuk air tanah pada CAT	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
		Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.02	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	0	120	120	100.00	120	120	100.00
3.29.002.1.02.001	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah SOP Perizinan Air Tanah	0	0	1	1	100.00	1	1	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.002.1.02.002	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Prov	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan air Tanah	0	0	100	100	100.00	100	100	100.00
3.29.002.1.02.003	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Prov	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	100	0	4	4	100.00	150	150	150.00
3.29.002.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Aturan terkait Nilai Perolehan Air Tanah	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.002.1.03.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah data dan Informasi NPA Kabupaten/Kota yang terkumpul dan diolah	10	0	5	5	100.00	10	10	100.00
3.29.002.1.03.002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten/Kota	0	0	1	0	-	0	0	#DIV/0!
3.29.002.1.03.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah perusahaan Pemakaian air Tanah yang dikendalikan dan diawasi	0	0	1	0	-	0	0	#DIV/0!
3.29.003	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50%	0	35%	35%	100.00	50%	50%	100.00
3.29.003.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi								
3.29.003.1.01.002	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	0	0	1	1	100.00	1	1	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Data dan Informasi Pemanfaatan WIUP	9	0	9	9	100.00	9	9	100.00
3.29.003.1.01.004	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	0	0	4	4	100.00	4	4	#DIV/0!
3.29.003.1.01.005	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	0	0	1	1	100.00	1	1	#DIV/0!
3.29.003.1.01.006	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Dalam 1 Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.003.1.01.007	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	0	0	10	10	100.00	10	10	#DIV/0!
3.29.003.1.01.008	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha pertambangan Operasi produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN	0	0	12	12	100.00	12	12	#DIV/0!

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.02	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah	Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3	0						
3.29.003.1.02.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan CnC yang menerapkan efisiensi bahan bakar dan penggunaan biodiesel 20%	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.02.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	9	0	9	9	100.00	9	9	100.00
3.29.003.1.02.004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah Pengawasan Perusahaan yang mengikuti Kaidah Pertambangan Yang Baik	15	0	15	15	100.00	15	15	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3	0	3	3	100.00	3	3	100.00
3.29.003.1.03.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.03.003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada WIUP Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	25	0	25	25	100.00	25	25	100.00
3.29.003.1.03.005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	65	0	65	65	100.00	65	65	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.04.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat	0	0	1	1	100.00	1	1	#DIV/0!
3.29.003.1.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.04.004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah pengawasan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.04.005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Luas lahan yang direklamasi dan revegetasi	1	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan pemurnian	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.003.1.05.001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan IUP OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Tersedianya Data dan Informasi Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian	1	0	1	1	100.00	0	0	-
3.29.003.1.05.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan OPK untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka PMDN yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00
3.29.003.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10	0	10	10	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.07.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tersedianya Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	0	9	9	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.07.002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	SK Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	10	0	10	10	100.00	10	10	100.00
3.29.003.1.07.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Jumlah Perusahaan yang menerapkan harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	0	20	20	100.00	20	20	100.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.003.1.08	Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya Dilakukan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha pertambangan Operasi produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka PMDN	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.003.1.08.001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	12	0	12	12	100.00	12	12	100.00
3.29.005	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT	8.40%	0	6.08%	6.08%	100.00	7.34%	7.34%	87.38
3.29.005.1.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.005.1.01.001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.005.1.01.002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.01.003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	1	1	#DIV/0!
3.29.005.1.02	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah potensi dan pemanfaatan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.005.1.02.001	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesyaratan SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.005.1.02.002	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.005.1.02.003	Penatausahaan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SKT IUJP Dalam Daerah Provinsi yang dikendalikan dan diawasi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.005.1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.03.001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Penetapan Prosedur dan Pesaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Dengan Kapasitas 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.005.1.03.002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000	Jumlah rekomendasi Teknis Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun	0	0	1	1	100.00	1	1	#DIV/0!
3.29.005.1.03.003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.03.004	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Pelaksanaan Perizinan Bahan Bakar Nabati Kapasitas 10.000 Ton Per Tahun yang dikendalikan dan diawasi	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.005.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.001	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	SOP pelaksanaan konservasi energi	2	0	1	1	100.00	2	2	100.00
3.29.005.1.04.002	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Sosialisasi Penghematan Energi dan Air pada Usia dini	0	0	1	1	100.00	1	1	#DIV/0!
3.29.005.1.04.003	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Sosialisasi penghematan energi pada pengelola gedung Pemerintah	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.004	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang dibangun Instalasi biogas	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.006	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Peserta Pengelolaan Pelaksanaan Konservasi Energi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.005.1.04.007	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan KE dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	1200000	0	1135000	1143533	100.75	1165000	1165000	97.08
3.29.006.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20	0	40	40	100.00	15	15	75.00
3.29.006.1.01.003	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	20	0	40	40	100.00	15	15	75.00

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.006.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	60	0	60	60	100.00	60	60	100.00
3.29.006.1.02.001	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO) Jumlah badan usaha/instansi pemerintah yang mengajukan permohonan Izin Operasi (IO)	0	0	50	50	100.00	15	15	#DIV/0!
3.29.006.1.02.002	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah badan usaha/ instansi pemerintah yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	0	0	50	50	100.00	15	15	#DIV/0!
3.29.006.1.02.003	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang menerapkan keselamatan ketenagalistrikan	20	0	50	50	100.00	15	15	75.00
3.29.006.1.03	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang mendapat rancangan PerGub untuk penetapan tarif tenaga listrik	0	0	5	5	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.006.1.03.002	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan tarif tenaga listrik	0	0	5	5	100.00	0	0	#DIV/0!

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome/Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.006.1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	15	0	15	15	100.00	15	15	100.00
3.29.006.1.05.001	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan pemegang izinv	15	0	15	15	100.00	15	15	100.00
3.29.006.1.05.002	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis IUJPTL	20	0	15	15	100.00	0	0	-
3.29.006.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Data warga yang belum berlistrik d isekitar jaringan Listrik PLN	0	0	1	1	100.00	0	0	#DIV/0!
3.29.006.1.06.003	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi yang dilakukan sosialisasi keselamatan Listrik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.004	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Data Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.005	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Laporan Koordinasi/Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik	1	0	1	1	100.00	1	1	100.00
3.29.006.1.06.006	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS dan Jaringan Distribusi Listrik	6	0	5	5	100.00	8	6	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan bidang urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan sehingga tidak memiliki SPM dan juga tidak memiliki standar sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diukur dengan menggunakan indikator dengan target kinerja yang telah disepakati secara internal sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Capaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Tahun 2021 digambarkan dalam Tabel T-C.30.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian			Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Thn 2019 (thn n-3)	Thn 2020 (thn n-2)	Thn 2021 (thn n-1)	Thn 2022 (thn n)	Thn 2023 (thn n+1)	Thn 2019 (thn n-3)	Thn 2020 (thn n-2)	Thn 2021 (thn n-1)	Thn 2022 (thn n)	Thn 2023 (thn n+1)	
Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah	Rasio Elektrifikasi	%	85,50	87,50	91,50	93,00	95,00	88.93	90.21	91.98	93.00	95.00	
1. Terwujudnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan	Persentase Pemanfaatan Potensi Air Tanah	%	0	0	0,58	0,75	0,75			0,75	0,75	0,75	
	Persentase jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan produksi	%	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59	38,86	42,75	46,63	54,40	59,59	
2. Meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga pengguna listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	%	85.50	87.50	91.50	93.00	95.00	88.93	90.21	91.50	93.00	95.00	
3. Terpenuhinya kebutuhan energi di daerah terpencil	Rasio Desa Besrlistrik	%	99.00	99.13	99.33	99.52	100.00	99.13	100	100	100	100.00	

Capaian kinerja Tahun 2022 (tahun n) yang merupakan periode keempat Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur diproyeksikan tercapai 100% sebagaimana target pada Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh stakeholder lainnya terkait pemenuhan kebutuhan energy listrik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 (lima) tahun (2019-2023) mendatang. Isu–isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral.

Isu strategis menjadi dasar penetapan kebijakan strategis pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

1. Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya masih sedikit, karena potensi energi terbarukan terdapat pada lokasi yang jauh dari pengguna/penerima manfaat, mahalnya biaya investasi, harga jual beli energi secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya saran infrastruktur pendukung di lokasi tersebut.

Adapun potensi tersebut diantaranya adalah :

- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat pada 33 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 2.118,8 Mega Watt (berdasarkan hasil survei Japan International Cooperation Agency (JICA) dan PT. PLN tahun 1983).
- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat pada 32 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 3,112 Mega Watt.

- Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat pada 32 lokasi dengan total potensi kapasitas sebesar 3,112 Mega Watt.
 - Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dari limbah gas pabrik sawit (POME) terdapat pada 75 lokasi dengan total kapasitas sebesar 170.5 Mega Watt.
 - Potensi biogas untuk keperluan rumah tangga (memasak) yang tersebar di 10 kabupaten/kota dengan total kapasitas sebesar 30.887 M³.
 - Bila radiasi sinar matahari di Kalimantan Timur sama dengan rata-rata radiasi sinar matahari di Indonesia yakni sekitar 4.8 KWh/m², maka potensi energi yang dapat dimanfaatkan terhadap 10% dari seluruh wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 61 Giga Watt peak (GWp).
2. Rasio Elektrifikasi dan efisiensi penggunaan listrik di Kalimantan Timur belum optimal; Sementara potensi energi baru terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan.
- Kapasitas terpasang pembangkit listrik PT PLN (Persero) Distribusi Kalimantan Timur sampai akhir Desember 2017 mencapai 1.229 MW, dengan Panjang Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi 1.025 kms, panjang Jaringan Tegangan Menengah 4.717 Kms; Panjang Jaringan Tegangan Rendah 4.650 Kms; dan total Gardu Induk 1.310 MVA, Total Gardu Distribusi 765 MVA.
3. Terjadinya kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)
- Komoditas tambang batubara memunculkan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di Kab/Kota, dengan luasan pada tahun 2020 sebesar 2,25 Hektar.
4. Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan usaha pertambangan dalam meningkatkan nilai tambah dan kontribusi terhadap PDRB dan banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dan kegiatan usaha sektor lain.

Pengelolaan mineral dan batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Timur baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemmurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta kegiatan pasca tambang. Di Provinsi Kalimantan Timur jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebanyak 1.404 IUP yang terdiri dari : IUP Eksplorasi 491 izin ; IUP Operasi Produksi sebanyak 154 izin; IUP-OP Khusus Pengangkutan Penjualan sebanyak 4 izin; Izin Usaha Jasa Pertambangan sebanyak 139 izin; Izin Gudang Handak sebanyak 5 izin; Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebanyak 210 izin; Rekomendasi Pembelian Handak sebanyak 19 izin; Pengangkatan Kepala Teknik Tambang sebanyak 104 izin, dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebanyak sebanyak 51 izin. Sedangkan jumlah IPR yang diterbitkan sebanyak 116 izin.

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran Produksi dan Iuran Tetap) Kalimantan Timur (Prov/Kab/Kota) tahun 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 35% dari periode Tahun sebelumnya. Komoditas tambang dari hasil kegiatan penambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri dan dalam negeri dan sebagian dipergunakan sendiri oleh perusahaan sebagai sumber pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri.

5. Belum optimalnya informasi geologi dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumber daya geologi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan kondisi geologi wilayah Provinsi Kalimantan Timur merupakan rangkaian perbukitan struktural sebagai pembatas dan cekungan sedimen yang kaya sumber daya mineral baik logam maupun non logam serta

suberdaya energi baik batubara maupun minyakbumi dan gasbumi. Yang secara fisiografi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Cekungan Sedimen, yaitu :

- Cekungan Kutai, pelamparannya dimulai dari Wilayah Kabupaten Mahakam Hulu di sisi Barat hingga Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara di sisi Timur dan dibatasi oleh Tinggian Mangkalihat di bagian Utara, Zona Sesar Adang di sebelah Selatan, Tinggian Kuching di bagian Barat dan Palung Sulawesi di bagian Timurnya.
- Cekungan Tarakan yang meliputi Kabupaten Berau yang terdiri dari Sub-Cekungan Berau dan Sub-Cekungan Muara, pelamparan cekungan ini mulai dari Kecamatan Segah hingga Kecamatan Sambaliung (Sub-Cekungan Berau) dan dari Kecamatan Biatan hingga Kecamatan Biduk Biduk. Pada sisi Utara berbatasan dengan Sub-Cekungan Tarakan, sisi Barat berbatasan dengan Tinggian Kuching dan sisi Selatan berbatasan dengan Tinggian Mangkalihat.
- Cekungan Pasir, meliputi wilayah sebelah selatan Sesar Adang di daerah Kuaro, Kabupaten Paser hingga Daratan Mikro Kontinen Partenoster di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan disisi barat berbatasan dengan tinggian Pegunungan Meratus.

Informasi geologi secara menyeluruh sangat diperlukan dalam upaya pengembangan wilayah, namun demikian keberadaan informasi geologi di Kalimantan Timur masih sangat terbatas.

6. Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi dan lingkungan geologi.

Akibat dari suatu kegiatan pembangunan akan timbul berbagai dampak terhadap lingkungan setempat baik dampak positif maupun dampak negatif, yang sangat erat berkaitan dengan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya alam serta kondisi geologi setempat. Apabila tidak ditanggulangi dengan baik kegiatan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, yang dapat

mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang tidak teratur dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan intensitas terjadinya bencana (geologi) seperti longsor dan lain-lain. Disamping itu, dengan seringnya terjadi bencana tanah longsor baik pada daerah dengan kerentanan gerakan tanah tinggi maupun sedang, maka kedepan diperlukan pemetaan resiko bencana kegeologian.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pembangunan berbagai bidang di Kalimantan Timur berlangsung dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Interaksi dari lajunya pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan lahan (wilayah) yang baik. Sedangkan keberadaan suatu lahan diatas bumi ini tidak terlepas dari pengaruh faktor- faktor geologi, baik sebagai produk yang menguntungkan maupun yang merugikan. Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi diharapkan dapat memberikan masukan atau memecahkan masalah terutama untuk perencanaan pengembangan wilayah.

Isu – isu strategis tersebut merupakan akumulasi isu – isu strategis dari unit - unit yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

A. Bidang Energi Baru dan Terbarukan

Isu Strategis dalam bidang pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi, daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, harga jual beli energi baru terbarukan secara ekonomi kurang menarik serta terbatasnya sarana infrastruktur pendukung di lokasi tersebut. Untuk itu diperlukan peran serta Pemerintah dalam membangun infrastruktur dimaksud, melalui program dan pendanaan yang memadai.

B. Bidang Ketenagalistrikan

Dibidang Ketenagalistrikan isu strategisnya adalah : 2,5% masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur belum menikmati listrik PLN, karena Rasio Elektrifikasi (RE) sekitar 97,5% Tahun 2018, Efisiensi penggunaan energy listrik belum optimal. Potensi energy terbarukan cukup besar untuk mendukung listrik pedesaan namun proses pengembangannya memerlukan dukungan infrastruktur dan pendanaan yang tidak sedikit.

Isu strategis bidang ini adalah Belum tertatanya sistem dan manajemen penyediaan listrik di Kalimantan Timur, Belum meratanya jaringan listrik antarwilayah yang dapat menjangkau daerah pedesaan, pedalaman dan perbatasan, Belum optimalnya pemanfaatan batubara dan sumber energi lainnya sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik, Belum berkembangnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangkit dan jaringan listrik. Cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai tahun 2017 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 84.07%. Namun demikian tingkat elektrifikasi pedesaan telah mencapai 96,92%. Beberapa upaya telah dilakukan antara lain pembangunan pembangkit listrik oleh swasta dan PT. PLN (Persero) dan pengembangan sumber energi terbarukan. Sedangkan meningkatnya pemanfaatan POME dikarenakan mempunyai prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

C. Bidang Geologi dan Air Tanah

Isu strategis bidang ini adalah Masih banyak wilayah rawan bencana yang belum terpetakan, Secara geografis sebagian wilayah di Kalimantan Timur rawan terhadap bencana geologi, seperti tanah longsor, banjir bandang dan potensi tsunami. Kegiatan penatagunaan lahan dan penyusunan Percepatan peningkatan produksi gas bumi untuk pasokan gas

di kawasan industry Kalimantan Timur. Dalam hal ketersediaan energy, pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan energy terutama minyak dan gas bumi. Kebutuhan energy tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energy dikarenakan cadangan energy utamanya energy (bahan bakar) fosil cadangannya semakin kecil yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energy yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energy. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kalimantan Timur.

D. Bidang Mineral dan Batubara

Isu strategis sector mineral dan batubara adalah Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi sehingga meningkat pula konsumsi bahan tambang sebagai material dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, bangunan, perumahan dan lain-lain, sementara masih banyak komoditas dari hasil pertambangan yang dijual dalam bentuk raw material. Disamping itu masih juga terdapat kegiatan pertambangan tanpa ijin yang marak di setiap Kabupaten dan Kota yang berkedok pada pemanfaatan/pematangan lahan untuk kepentingan tanah kavling dan lainnya.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Potensi Sumber Daya Alam yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Timur semestinya tidak menjadi kekhawatiran, justru menginspirasi dan memotivasi Perangkat Daerah untuk melakukan terobosan mengolah kekayaan dan potensi sumber daya alam serta potensi sumber energy terbarukan untuk mengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui (renewable). Saatnya kita berpaling untuk memanfaatkan kekayaan dan potensi energi yang sumbernya beragam seperti tenaga surya/sinar matahari dan sumber-sumber energy alternative lainnya. Berikut beberapa

tantangan dan peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah antara lain :

Bidang Energi Baru dan Terbarukan

Tantangan	Peluang
Lokasi terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi.	Pembangunan dalam rangka penyediaan energi dengan memanfaatkan potensi energi setempat.
Harga jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih belum kompetitif	Pemerintah memberikan insentif yang cukup terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan dan berperan serta dalam menyediakan infrastruktur melalui pengadaan lahan dan lain-lain
Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air, biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil	Mendorong perluasan jaringan transmisi dan distribusi energi hingga mencapai daerah yang memiliki potensi energi terbarukan atau menciptakan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi pada lokasi-lokasi yang dekat dengan daerah yang memiliki potensi energi terbarukan tersebut.
Kurangnya budaya dan kesadaran serta pengetahuan tentang hemat energi	Penyebaran luasan informasi dan pengetahuan hemat energi pada masyarakat dan industri yang belum menggunakan energi secara efisien.
Infrastruktur, kemampuan jasa dan industri EBT di Prov. Kaltim belum berkembang	Terbuka peluang usaha dalam infrastruktur, jasa dan industri bidang EBT

Bidang Ketenagalistrikan

Tantangan	Peluang
Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak	Pengembangan sumber energi listrik alternatif
Minimnya infrastruktur energi listrik untuk mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan produktivitas masyarakat, peningkatan dunia usaha, dan pengembangan berbagai kegiatan berbasis teknologi yang memerlukan pasokan listrik secara memadai	Penyediaan energi listrik diarahkan pada pembangunan pusat-pusat pembangkit listrik, pengembangan sumber energi listrik alternatif, peningkatan efisiensi dalam manajemen sumber daya listrik, dan perluasan jaringan terpasang

Bidang Geologi dan Air Tanah

Tantangan	Peluang
Belum termanfaatkannya data dan informasi mengenai pengelolaan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi serta pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah	Optimalisasi pengelolaan air tanah, inventarisasi dan pemetaan sumberdaya geologi
Bencana alam tidak dapat diramalkan kapan terjadinya	Upaya preventif dengan early warning sistem
Pola penanggulangan bencana alam masih bersifat parsial, kurang terpadu dan kurangnya koordinasi antar semua pihak	Peningkatan sinergi para pihak
Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana alam dan kurangnya sarpras dalam penanggulangan bencana alam	Peningkatan Sumberdaya Manusia dan sapsrasnya
Potensi air tanah di Kalimantan Timur cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan	Pengusahaan Pengeboran Air Tanah
Belum terpetakannya daerah sulit air di Provinsi Kalimantan Timur	
Regulasi pemanfaatan air tanah belum berjalan optimal	Penerapan regulasi pemanfaatan air tanah untuk meningkatkan retribusi/nilai perolehan air

Bidang Mineral dan Batubara

Tantangan	Peluang
Percepatan penataan IUP Bahan Galian Batubara Provinsi Kalimantan Timur	Kepastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan mineral serta menjamin pemenuhan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi
Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB masih rendah	Membangun sentra-sentra unit usaha kemasayarakat melalui program CSR sebagai penyokong ekonomi kerakyatan
Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota	
Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan	Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan wilayah berbasis potensi local (perkebunan, pertanian, perikanan)

oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian	dll) dengan fasilitasi perusahaan melalui CSR.
Banyak lokasi pertambangan batubara yang telah ditinggalkan oleh pengusaha	Mengelola asset perusahaan yang ditinggalkan menjadi komoditi yang dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah melalui upaya sector pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata

Formulasi isu-isu penting

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Menyediakan pasokan energi untuk daerah terluar tertinggal dan terpencil	Terpenuhinya kebutuhan energi didaerah terluar, tertinggal dan terpencil.	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi potensi energi terbarukan - Pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan - Pembinaan pengawasan dan pengelolaan energi terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi setempat . - Meningkatkan dan mendorong investasi sebagai upaya pengembangan energi terbarukan.
Menyediakan pasokan listrik yang aman dan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi penduduk daerah pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan - Meningkatnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan, kepulauan yang belum terjangkau layanan listrik - Pengembangan pembangkit listrik tersebar 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan aksesibilitas masyarakat khususnya pedesaan, daerah terpencil dan wilayah kepulauan terhadap pelayanan listrik yang murah dan berkualitas
Terpenuhinya kebutuhan industri pemakai komoditas tambang yang ada di Kalimantan Timur	- Menyediakan komoditas tambang bagi pelaku industri pemakai komoditas tambang (PLTU)	Menarik investor dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Tambang	Memberikan kemudahan perizinan sektor pertambangan dan dukungan infrastruktur serta menjamin

<p>Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan</p>	<p>Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang</p>	<p>Pembinaan dan Pengawasan produksi batubara Kalimantan Timur</p>	<p>Penetapan Perda/pegub dan instrument aturan lainnya</p>
<p>Terwujudnya pengelolaan air tanah yang ber wawasan keseimbangan lingkungan.</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan air tanah yang berorientasi pada aspek konservasi</p> <p>Terlindunginya wilayah resapan sebagai daerah imbuhan air tanah.</p> <p>Meningkatkan penyediaan air bersih dari air tanah bagi daerah sulit air</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pemanfaatan air tanah. - Melakukan Penelitian zona konservasi dan pemanfaatan air tanah - Melakukan penelitian dan penataan fungsi lahan untuk mempertahankan siklus hidrologi dengan baik - Melakukan penyelidikan, eksplorasi dan eksploitasi air tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pemanfaatan air tanah - Meningkatkan kajian lingkungan guna eksistensi air tanah tetap terjaga - Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah , eksplorasi dan pembangunan sumur bor air tanah
<p>Terwujudnya peningkatan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat</p>	<p>Meningkatnya penyediaan data dan informasi sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, geologi lingkungan. - Melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana geologi. 	<p>Meningkatkan ketersediaan informasi sumberdaya geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.</p>

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan fokus dan tema pembangunan *“Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang”* merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2023 yaitu :

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pematapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional serta isu-isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2023. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang urusan energi dan sumberdaya mineral sebagaimana pada Tabel T-C.31. berikut :

Tabel T-C.31.
Review Terhadap Rancangan RKPd Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

PD : Energi dan Sumber Daya Mineral

No	RANCANGAN RKPd						Hasil Analisa Kebutuhan					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	%	84	23,050,868,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	84	23,050,868,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	6	1,800,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6	1,800,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	650,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	650,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	20,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	20,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Pulau Derawan, Teluk Semanting Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Indah Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Tepian Makmur Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Buta Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Layung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	18	1,050,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Pulau Derawan, Teluk Semanting Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Indah Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Tepian Makmur Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Buta Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Layung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	1,050,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable	Dokumen	1	16,106,905,140	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable	1	16,106,905,140	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74	15,506,905,140	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	15,506,905,140	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	600,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	600,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN	Pegawai	131	304,965,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN	131	304,965,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	104,965,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	104,965,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	200,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40	200,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	Bulan	12	1,548,486,860	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12	1,548,486,860	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	35,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	45	77,878,860	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	77,878,860	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30,568,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	30,568,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	23,040,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	23,040,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	6,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	6,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	106,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	106,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1,250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1,250,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	33	260,650,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	33	260,650,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	73	76,400,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73	76,400,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	184,250,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	184,250,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kegiatan kantor	Bulan	12	2,486,487,958	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kegiatan kantor	12	2,486,487,958	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	23,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	23,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	279,207,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	279,207,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,183,680,558	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,183,680,558	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	Bulan	12	543,373,042	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	12	543,373,042	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	290,409,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	290,409,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	109,505,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	109,505,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	143,459,042	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	143,459,042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	%	38.38	2,372,950,000	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	38.38	2,372,950,000	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	Dokumen	1	1,922,950,000	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1	1,922,950,000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	937,950,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	937,950,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	CAT	1	60,000,000	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	1	60,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	Laporan Peta Peta Dokumen	10 1 1 1	925,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	10 1 1 1	925,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Perusahaan	120	450,000,000	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	450,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Rekomtek	100	200,000,000	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100	200,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Perusahaan	120	250,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Semua Kab/Kota, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	250,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	%	50	1,373,176,000	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50	1,373,176,000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Dokumen	1	100,000,000	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1	100,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan	9	100,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	9	100,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah		Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	Dokumen	3	342,960,000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah		Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3	342,960,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	IUP	15	100,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15	100,000,000	
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Laporan	16	242,960,000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16	242,960,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	Dokumen	3	338,600,000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Surat Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan	3	338,600,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen	1	100,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1	100,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	IUP	25				Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	25		
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Laporan Perusahaan	16 16	238,600,000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka PMDN pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, SemuaKecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16 16	238,600,000	
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen	4	92,616,000	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	4	92,616,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen Laporan	1 1	92,616,000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 1	92,616,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	20	159,000,000	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	159,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	20	159,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	159,000,000	
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	Kab/Kota	10	340,000,000	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10	340,000,000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen	1	125,000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1	125,000,000	
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen	1	100,000,000	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1	100,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan	20	115,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20	115,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Pemanfaatan EBT	%	8.4	3,395,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Pemanfaatan EBT	8.4	3,395,000,000	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kab/Kota	4	400,000,000	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	4	400,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen	1	400,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	400,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	Dokumen	1	500,000,000	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	500,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Pemutakhiran Data Potensi Bioenergi	Laporan Dokumen	1 1	500,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Pemutakhiran Data Potensi Bioenergi	1 1	500,000,000	
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	SK	1	2,495,000,000	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	2,495,000,000	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Dokumen	2	55,000,000	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2	55,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	Sekolah Kegiatan	4 2	150,000,000	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	4 2	150,000,000	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembangunan Instalasi Biogas	Unit	36	2,120,000,000	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pembangunan Instalasi Biogas	36	2,120,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Kegiatan	3	170,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3	170,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah KK Berlistrik	KK	1200000	51,220,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Jumlah KK Berlistrik	1200000	51,220,000,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	Perusahaan	20	300,000,000	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20	300,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	Laporan Rumah	1 200	300,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	1 200	300,000,000	
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	Perusahaan	60	800,000,000	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	60	800,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	Perusahaan Perusahaan	20 30	300,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	20 30	300,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	Rumah	200			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	200		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	Perusahaan	15	500,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	15	500,000,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Perusahaan	12	300,000,000	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	300,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	Perusahaan	12	300,000,000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan	12	300,000,000	
			Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen	12				Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12		
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana		Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	Dokumen	1	49,820,000,000	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana		Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	49,820,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data kelompok masyarakat tidak mampu	Dokumen	1	840,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data kelompok masyarakat tidak mampu	1	840,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data penyediaan tenaga listrik pedesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen Dokumen	1 20	500,000,000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Data penyediaan tenaga listrik pedesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 20	500,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	Laporan Dokumen	20 1	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	20 1	300,000,000	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Matalibaq	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Lokasi Unit	6 6	48,180,000,000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Matalibaq	Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6 6	48,180,000,000	
TOTAL PAGU						81,411,994,000					81,411,994,000	

Sasaran RKPDP Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan tercapai dengan melaksanakan program prioritas di bidang urusan energi dan sumberdaya mineral dengan target kinerja sebagaimana pada Tabel T-C.31.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah sebagaimana disebut di atas, RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 juga telah menggariskan program/kegiatan pendukung dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019.

Dari hasil review dan klarifikasi yang dilakukan terhadap program dan kegiatan baik prioritas maupun pendukung dalam RKPDP tersebut ditemukan bahwa rumusan program/kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, besaran pagu indikatif, serta prakiraan maju Tahun 2023 telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi maupun pengamatan selama pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan musrenbang Provinsi Kalimantan Timur terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kegiatan yang diusulkan/diminta oleh masyarakat tersebut terutama menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar yaitu :

- pemasangan sambungan rumah gratis bagi keluarga tidak mampu
- permintaan pemasangan PLTS di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan jaringan listrik PLN
- permintaan pembangunan instalasi biodigester untuk masyarakat
- permintaan pembuatan sumur bor eksplorasi/eksploitasi air di daerah-daerah krisis air bersih dan daerah pesisir

Usulan kegiatan tersebut di atas sebagian yang dapat terakomodir di dalam rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Tahun 2023, sebagaimana juga telah digariskan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Desa Pegat Betumbuk (seberang) Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. 2. Desa Long Sului/Long Pelay Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. 3. Desa Tanjung Mangkaliat Kec. Sandaran Kabupaten Kutai Timur. 4. Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu 5. Desa Lemper dan Desa Deraya Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat 6. Dusun Mului Desa Swanselutung Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser	- Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS - Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6 Lokasi 6 Unit	Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan Revitalisasi PLTS Terpusat
2	Pengelolaan Energi Terbarukan	1. Kampung Tumbit Dayak & Kampung Bebanir Bangun Kec. Sambaliung Kab. Berau (16 Unit) 2. Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu, Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kab. Kukar (20 Unit).	Pembangunan Instalasi Biogas	36 Unit	Pembangunan Biogas

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 yang terkait dengan bidang urusan energi dan sumber daya mineral sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel-5
Identifikasi Kebijakan Nasional (*bidang urusan ESDM*)

No.	Tema RKP Nasional	Sumber	Keterangan
1.	Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas	RKP Thn 2019	
2.	Peningkatan SDM untuk Pertumbuhan Berkualitas	RKP Thn 2020	
3.	“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”	RKP Thn 2021	
4.	“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”	RKP Thn 2023	

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan kebijakan nasional sebagaimana diuraikan pada Tabel-5 berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah Kalimantan Timur, khususnya dalam fokus/prioritas peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur energy, pemantapan infrastruktur sumber daya air, pembangunan sumber daya air, perlindungan sumber air dan ekosistemnya, pemenuhan kebutuhan air serta peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi. Hal ini juga berpengaruh sangat besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur pada akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan pemanfaatan energy baru terbarukan;;
2. Terwujudnya perusahaan ketenagalistrikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdaya saing tinggi;
3. Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis mineral dan batubara;
4. Terwujudnya Peningkatan Status dan Kualitas Data Dasar Geologi, Sumber Daya Geologi, Penataan Ruang Berbasis Geologi, serta Mitigasi Bencana Geologi bagi semua sector pengguna;

Sasaran-sasaran yang ditetapkan selama 5 tahun (Tahun 2019 – 2023) dalam rangka pencapaian tujuan diatas adalah :

1. Menurunnya penggunaan energi fosil yang tidak terbarukan ke energi terbarukan
2. Meningkatnya efisiensi penggunaan energy
3. Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan bioenergy
4. Meningkatnya infrastruktur energi dan ketenagalistrikan bagi sector pengguna
5. Terpenuhinya kebutuhan listrik di pedesaan
6. Terwujudnya perusahaan ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan
7. Meningkatnya kualitas perusahaan sesuai kaidah pertambangan yang berlaku
8. Terwujudnya rehabilitasi lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan
9. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan yang ramah lingkungan dan rendah emisi

10. Penyiapan dan Penyediaan Data, Informasi dan Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan untuk Penataan Ruang dan Infrastruktur untuk keperluan sector pengguna
11. Peningkatan Kualitas Data Keprospekan Sumber Daya, Batubara, Migas dan Mineral
12. Mengoptimalkan pemanfaatan air melalui penerapan cara-cara penggunaan air, memelihara jumlah, waktu aliran, dan kualitas air secara efisien

3.3. Program dan Kegiatan

Sasaran dan tujuan sebagaimana disebut diatas diharapkan akan tercapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program penunjang/kesekretariatan dan program strategis/teknis. Uraian program dan kegiatan tersebut mengacu pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 maupun Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Secara rinci program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 terdiri atas 5 program dan 24 kegiatan serta 61 sub kegiatan sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (PILIHAN) :

Sekretariat :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 10) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 15) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 16) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 17) Penyediaan Bahan/Material
- 18) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 20) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 21) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 22) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 23) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 25) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 26) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 27) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Bidang Geologi dan Air Tanah

2. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN

- 8. Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**
- 28) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 29) Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 30) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 9. Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**
- 31) Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
- 32) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah

Bidang Mineral dan Batubara

3. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

- 10. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil**
- 33) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
- 11. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah**
- 34) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah
- 35) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah

12. **Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**
 - 36) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
 - 37) Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil
13. **Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**
 - 38) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat
14. **Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama**
 - 39) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama
15. **Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**
 - 40) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 41) Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci
 - 42) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

4. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN

16. **Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan**
 - 43) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan
17. **Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**
 - 44) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000
18. **Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**
 - 45) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
 - 46) Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi
 - 47) Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
 - 48) Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

Bidang Ketenagalistrikan

5. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

19. **Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**
 - 49) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
20. **Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**
 - 50) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
 - 51) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
21. **Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri**
 - 52) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
22. **Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana**
 - 53) Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
 - 54) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 55) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - 56) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Rumusan program dan kegiatan yang meliputi indikator kinerja, jumlah pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
					Program	Keluaran Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						81,411,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			84 %		23,050,868,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran			6 Dokumen	1,800,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	650,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Pulau Derawan, Teluk Semanting Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Indah Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Tepian Makmur Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Buta Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Layung		18 Laporan	1,050,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akutable			1 Dokumen	16,106,905,140	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		74 Orang/Bulan	15,506,905,140	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	600,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN			131 Pegawai	304,965,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3 Paket	104,965,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang	200,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai			12 Bulan	1,548,486,860	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		11 Paket	35,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		45 Paket	77,878,860	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Paket	20,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		4 Paket	30,568,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	23,040,000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6 Paket	6,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	106,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Laporan	1,250,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah			33 Unit	260,650,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		73 Unit	76,400,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		30 Unit	184,250,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kegiatan kantor			12 Bulan	2,486,487,958	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	23,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	279,207,400	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	2,183,680,558	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala			12 Bulan	543,373,042	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		39 Unit	290,409,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		17 Unit	109,505,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3 Unit	143,459,042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan		38.38 %		2,372,950,000	
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan			1 Dokumen	1,922,950,000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	937,950,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 CAT	60,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Laporan 1 Peta 1 Peta 1 Dokumen	925,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan			120 Perusahaan	450,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah		Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 Rekomtek	200,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120 Perusahaan	250,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		50 %		1,373,176,000	
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi			1 Dokumen	100,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Laporan	100,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah		Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara			3 Dokumen	342,960,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 IUP	100,000,000	
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Laporan	242,960,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku			16 Perusahaan		
	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat		Jumlah Verifikasi Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			4 Dokumen	92,616,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat		Data dan Informasi Wilayah Pertambangan Rakyat dalam daerah provinsi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 1 Laporan	92,616,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi			20 Perusahaan	159,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Perusahaan	159,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi			10 Kab/Kota	340,000,000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	125,000,000	
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci		Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	100,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Laporan	115,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT	Pemanfaatan EBT		8.4 %		3,395,000,000	
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			4 Kab/Kota	400,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Kaltim		1 Dokumen	400,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air			1 SK	2,495,000,000	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi		Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	55,000,000	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Sekolah 2 Kegiatan	150,000,000	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Pembangunan Instalasi Biogas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Unit	2,120,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kegiatan	170,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	Jumlah KK Berlistrik		1,200,000 KK		51,220,000,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)			20 Perusahaan	300,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan	300,000,000	
			Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik			200 Rumah		
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)			60 Perusahaan	800,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Perusahaan	300,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik			30 Perusahaan 200 Rumah		
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN			15 Perusahaan	500,000,000	
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)			12 Perusahaan	300,000,000	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Perusahaan 12 Dokumen	300,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana		Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan			1 Dokumen	49,820,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Data kelompok masyarakat tidak mampu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	840,000,000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Data penyediaan tenaga listrik pedesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 20 Dokumen	500,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Data Penyediaan Tenaga Listrik Perdesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Laporan 1 Dokumen	300,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Matalibaq		6 Lokasi 6 Unit	48,180,000,000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung Kalimantanb pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Renstra Dinas ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 memuat tentang program, kegiatan dan target-target capaian sasaran yang harus dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja ini selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf kearah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur seperti pada Tabel dibawah.

Tabel 4.1.
Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Program	Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						81,411,994,000	PAD				90,059,814,000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			84 %		23,050,868,000			Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	85	23,985,800,000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran			6 Dokumen	1,800,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	6	1,850,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	650,000,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	650,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000			Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	20,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000			Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	20,000,000			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	20,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Pulau Derawan, Teluk Semanting Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Indah Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Tepian Makmur Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Buta Kab. Paser, Batu Sopang, Rantau Layung		18 Laporan	1,050,000,000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	1,100,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel			1 Dokumen	16,106,905,140			Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Akuntabel	1	16,661,800,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		74 Orang/Bulan	15,506,905,140			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74	16,000,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	600,000,000			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	661,800,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN			131 Pegawai	304,965,000			Jumlah ASN	131	450,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3 Paket	104,965,000			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	200,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40 Orang	200,000,000			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	40	250,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai			12 Bulan	1,548,486,860			Jumlah Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	12	1,609,000,000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		11 Paket	35,000,000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11	35,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		45 Paket	77,878,860			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	78,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Paket	20,000,000			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	25,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		4 Paket	30,568,000			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	31,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		1 Dokumen	23,040,000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	24,000,000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		6 Paket	6,000,000			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6	10,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	106,000,000			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	106,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Laporan	1,250,000,000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1,300,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah			33 Unit	260,650,000			Jumlah Barang Milik Daerah	33	265,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		73 Unit	76,400,000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73	80,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		30 Unit	184,250,000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30	185,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kegiatan kantor			12 Bulan	2,486,487,958			Jumlah jasa kegiatan kantor	12	2,604,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	23,600,000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	24,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	279,207,400			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	280,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		12 Laporan	2,183,680,558			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2,300,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala			12	Bulan	543,373,042			Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah secara berkala	12	546,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		39	Unit	290,409,000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39	291,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		17	Unit	109,505,000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	110,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih		3	Unit	143,459,042			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	145,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan			38.38 %	38.38 %	2,372,950,000			Persentase zona konservasi air tanah yang ditetapkan	38.38	2,863,862,000
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan			1 Dokumen	1,922,950,000			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan	1	2,338,862,000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	937,950,000			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	1,200,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 CAT	60,000,000			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provins	1	95,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 Laporan 1 Peta 1 Peta 1 Dokumen	925,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Peta batuan pada CAT Peta geologi untuk air tanah pada CAT Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batuan	10 1 1 1	1,043,862,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan			120	Perusahaan	450,000,000			Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	525,000,000
	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah		Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100	Rekomtek	200,000,000			Jumlah Rekomendasi Teknis perizinan pemanfaatan air tanah	100	200,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah		Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120	Perusahaan	250,000,000			Jumlah perusahaan pemilik sumur bor air tanah yang mematuhi aturan	120	325,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			50 %	50 %	1,373,176,000			Persentase Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	50	1,840,152,000
	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi			1 Dokumen	100,000,000			Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1	120,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		9 Laporan	100,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	9	120,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara			3 Dokumen	342,960,000			Inventarisasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara	3	411,552,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 IUP	100,000,000			Jumlah perusahaan yang memenuhi standar K3 dan Lingkungan	15	120,000,000
	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah		Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Laporan	242,960,000			Jumlah Laporan perusahaan yang mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan perundangan yang berlaku	16	291,552,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			1 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1	
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi			20 Perusahaan	159,000,000			Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	250,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama		Jumlah Perusahaan yang diawasi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Perusahaan	159,000,000			Jumlah Perusahaan yang diawasi	20	250,000,000
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi			10 Kab/Kota	340,000,000			Standarisasi Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	10	600,000,000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	125,000,000			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	1	200,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci		Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	100,000,000			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1	200,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dikunci		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Laporan	115,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20	200,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pemanfaatan EBT			8.4 %		3,395,000,000			Pemanfaatan EBT	8.4	5,170,000,000
	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			4 Kab/Kota	400,000,000			Jumlah potensi dan pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	4	900,000,000
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan		Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	400,000,000			Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	1	900,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun		Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun			1 Dokumen	500,000,000			Jumlah potensi dan pemanfaatan Biofuel sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun	1	775,000,000
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Pemutakhiran Data Potensi Bioenergi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan 1 Dokumen	500,000,000			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun Pemutakhiran Data Potensi Bioenergi	1 1	775,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi		Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air			1 SK	2,495,000,000			Penerbitan Instruksi, Edaran, Himbauan Tentang Penghematan Energi dan Air	1	3,495,000,000
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi		Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	55,000,000			Pembuatan Dokumen Peraturan Gubernur	2	75,000,000
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi		Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Sekolah 2 Kegiatan	150,000,000			Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur	4 2	200,000,000
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi		Pembangunan Instalasi Biogas	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 Unit	2,120,000,000			Pembangunan Instalasi Biogas	36	3,000,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Kegiatan	170,000,000			Terlaksananya Pengawasan Konservasi Energi dan Pendistribusian BBM dan LPG bersubsidi	3	220,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Jumlah KK Berlistrik	Jumlah KK Berlistrik		120000 K 0 K	120000 KK 0	51,220,000,000			Jumlah KK Berlistrik	120000 0	56,200,000,000
	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)			20 Perusaha an	300,000,000			Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)	20	300,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi		Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan 200 Rumah	300,000,000			Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	1 200	300,000,000
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)			60 Perusaha an	800,000,000			Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	60	1,300,000,000
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Perusaha an	300,000,000			Jumlah perusahaan pemegang IUPTLS yang dilakukan pembinaan	20	300,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik			30 Perusahaan 200 Rumah				Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri Jumlah rumah masyarakat yang dilakukan perbaikan/peremajaan instalasi listrik	30 200	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 Perusahaan	500,000,000			Jumlah perusahaan pemegang izin non BUMN	15	1,000,000,000
	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)			12 Perusahaan	300,000,000			Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	12	300,000,000
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri		Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Perusahaan 12 Dokumen	300,000,000			Jumlah perusahaan pemegang IUJPTL yang dilakukan pembinaan Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 12	300,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana		Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan			1 Dokumen	49,820,000,000			Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan	1	54,300,000,000
	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu		Data kelompok masyarakat tidak mampu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	840,000,000			Data kelompok masyarakat tidak mampu	1	1,500,000,000
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan		Data penyediaan tenaga listrik pedesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen 20 Dokumen	500,000,000			Data penyediaan tenaga listrik pedesaan Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	1 20	500,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan Data Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 Laporan 1 Dokumen	300,000,000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan Data Penyediaan Tenaga Listrik Pedesaan	20 1	300,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	Kab. Berau, Kelay, Long Sului Kab. Berau, Pulau Derawan, Pegat Batumbuk Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung Kab. Mahakam Ulu, Long Hubung, Matalibaq		6 Lokasi	48,180,000,000			Jumlah Lokasi Pembangunan PLTS	6	52,000,000,000
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			6 Unit				Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	6	

BAB V

PENUTUP

Sebagaimana digariskan dalam Rancangan RKPD 2023 Provinsi Kalimantan Timur bahwa tema pembangunan pada Tahun 2023 ditekankan pada ***“Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”***, dengan prioritas pembangunan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi dan air. Oleh karena itu penting untuk memberikan perhatian yang lebih fokus baik menyangkut kerangka pendanaan maupun teknis pelaksanaan terhadap program/kegiatan prioritas yang secara langsung terkait dalam pencapaian target kinerja sasaran pembangunan tersebut.

Disusunnya Renja DESDM Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur DESDM Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggung Kalimantanban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Renja DESDM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Demikian semoga Renja ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur khususnya, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Samarinda, Maret 2022

KEPALA

CHRISTIANUS BENNY, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19770914 200112 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

☎ (0541) 74044 - Sentral ☎ 743085 - Kepala ☎ 745381 - Bidang Ekonomi ☎ 745351 - Bidang Perencanaan & Pengendalian
☎ (0541) 74228 - Faksimile ☎ 743086 - Ruang Rapat Ketua ☎ 745382 - Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya Pembangunan Daerah
☎ 736212 - Sekretaris ☎ 737551 - Bidang Prasarana Wilayah ☎ 745380 - UPTB. Pusat Data & Informasi

Samarinda, 07 Maret 2022

Nomor : 050/267 /B.PPEPD-Bapp/2022
Lampiran : 1 (satu) halaman
Perihal : Penyusunan Rancangan RENJA PD
Tahun 2023

Kepada Yth :
(daftar terlampir)

di -
Samarinda

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah agar melakukan *entry* terhadap isian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada tautan <https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id> sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perangkat Daerah agar mengisi dengan lengkap indikator kinerja, lokasi, serta target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD dan RENSTRA PD;
3. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rancangan RENJA diharapkan telah mengakomodir hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
4. Dokumen Rancangan RENJA agar disampaikan kepada BAPPEDA paling lambat tanggal 15 Maret 2022 untuk selanjutnya diverifikasi oleh Bidang Perencana.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Kepala,

Dr. Ir. H. M. Aswin, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19630216 198803 1 008

Tembusan Yth. :

1. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, di Samarinda (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor : 050/267 /B.PPEPD-Bapp/2021

Perihal : Penyusunan Rancangan RENJA PD Tahun 2023

Daftar Undangan :

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim
- 3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kaltim
- 4) Kepala BPSDM Prov. Kaltim
- 5) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim
- 6) Kepala Balitbangda Prov. Kaltim
- 7) Kepala Badan Penghubung Prov. Kaltim
- 8) Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kaltim
- 9) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda. Prov. Kaltim
- 10) Kepala Biro Kesra Setda. Prov. Kaltim
- 11) Kepala Biro Umum Setda. Prov. Kaltim
- 12) Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Kaltim
- 13) Kepala Biro Adbang Setda. Prov. Kaltim
- 14) Kepala Biro Perekonomian Setda. Prov. Kaltim
- 15) Kepala Biro PPOD Setda. Prov. Kaltim
- 16) Kepala Biro Organisasi Setda. Prov. Kaltim
- 17) Kepala Biro PBJ Setda. Prov. Kaltim
- 18) Inspektur Prov. Kaltim
- 19) Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kaltim
- 20) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim
- 21) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim
- 22) Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
- 23) Kepala Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim
- 24) Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim
- 25) Kepala DKP3A Prov. Kaltim
- 26) Kepala DPMPD Prov. Kaltim
- 27) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
- 28) Kepala Disperndagkop dan UMKM Prov. Kaltim
- 29) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
- 30) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim
- 31) Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim
- 32) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim
- 33) Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
- 34) Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim
- 35) Kepala Dinas Pariwisata Prov. Kaltim
- 36) Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
- 37) Kepala Dinas ESDM Prov. Kaltim
- 38) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim
- 39) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim
- 40) Sekretaris DRPD Prov. Kaltim
- 41) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltim
- 42) Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Prov. Kaltim
- 43) Direktur RSUD Kanujoso Djatiwibowo Prov. Kaltim
- 44) Direktur RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim
- 45) Sekretaris BAPPEDA Prov. Kaltim



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. MT. Haryono No.22 Telp (0541) 733621 Fax. (0541) 4113882

Website : <http://esdm.kaltimprov.go.id> E-mail : Sekretariat@esdm.kaltimprov.go.id
SAMARINDA 75124

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Nomor : K.050/12/DESDM/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

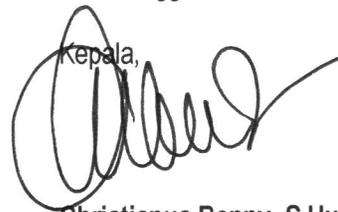
- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat 2 poin d dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023;
- b. bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013
11. Perpres Nomor 33 Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016

23. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur 050/1390/B.PPEPD-Bapp/2022 Tentang Penyempurnaan Rancangan Awal RENJA menjadi Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari Tim Pengarah, dan Tim Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Tim Pengarah,
bertugas dan bertanggungjawab memberikan pengarahan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta substansi pokok naskah Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
 - b. Tim Pelaksana,
bertugas dan bertanggungjawab Melaksanakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, penyesuaian program dan kegiatan kab/kota, penyusunan rancangan Renja PD, penyesuaian rancangan Renja PD dengan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibentuk Tim Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Maret 2022

Kepala,


Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19770911 200112 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalimantan Timur
Nomor : K.050/12/DESDM/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022
Tanggal : 1 Maret 2022

- I. Pelindung/Penanggung Jawab : **Christianus Benny, S.Hut. M.H**
Kepala Dinas
- II. Sekretaris : **Eddy Samudra**
Kasubag Perencanaan Program
- III. Anggota : 1. **Surta Hutahaeen**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
2. **Muhdri**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
3. **Elissa Dara Tamara**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
4. **Hesti Novita**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
5. **Ratna Sari**
Staf Subbag Perencanaan Program/Pelaksana
- IV. Nara Sumber/Pembicara : 1. Kepala Dinas
2. Unsur Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
- V. Moderator : Eddy Samudra
- VI. Pembawa Acara : Aji Eka Apriani
- VII. Pembaca Do'a : Solihin

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Kepala Dinas



Christianus Benny, S.Hut. M.H
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19770911 200112 1 003

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL DISKUSI FORUM PERANGKAT DAERAH
RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALTIM

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan Forum Perangkat Daerah terhadap Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, yang dihadiri oleh Para Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum pada daftar hadir Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Arah Kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, oleh Ir. Hidayanti Dharma, selaku Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemaparan materi Rancangan Rencana Kerja Dinas ESDM Tahun 2023, oleh Bpk. Christianus Benny, S.Hut, MH selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur;
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah dalam Rangka Rancangan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 terhadap materi yang dipaparkan.

Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023,

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program Kegiatan dan Indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan dari hasil Forum Perangkat Daerah ini;
- KEDUA** : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Berita Acara ini;
- KETIGA** : Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya akan disempurnakan berdasarkan Saran dan Tanggapan dari peserta forum Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Berita Acara ini;
- KEEMPAT** : Berita Acara ini beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
- KELIMA** : Berita Acara ini beserta lampirannya akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Demikian berita acara kesepakatan ini di buat dan disahkan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

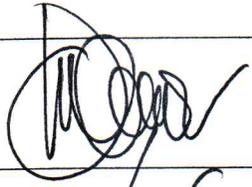
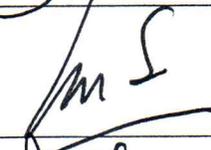
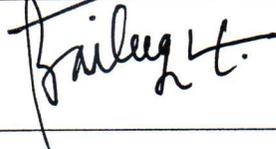
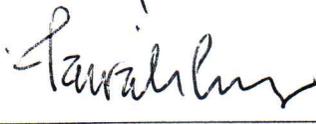
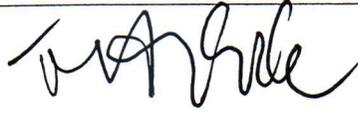
Samarinda, 11 Maret 2022
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala,

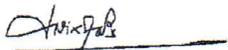
Christianus Benny, S.Hut, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770914 200112 1 003



LAMPIRAN I

Daftar Hadir wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Rancangan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.	Kepala Dinas ESDM Christianus Benny, S.Hut, MH	
2.	Kabid Ketenagalistrikan Mashur S Wira Adi, ST, MMT	
3.	Kabid EBTKE Baihaqi Hazami, ST, M.Si	
4.	Kabid Geologi dan Air Tanah Ir. PR. Bantolo, M.Sc	
5.	Kasubag Perencanaan Program Eddy Samudra, S.Sos	
6.	Kasi Produksi dan Penjualan Minerba Tajuddin Laddade, S.T., M.Si	
7.	Kasi Pemetaan Geologi Mardonius Herry Limbong, ST	
8.	Kasi Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Rini Diana Setyawati, ST	
9.	Bappeda Prov. Kaltim Ir. Hidayanti Dharma	
10.	Bapenda Prov. Kaltim Entjiek Faried Febrian	
11.	Bappedalitbang Herida Erhan	
12.	Bappedalitbang Kab. Berau Wahyulanda	
13.	Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Mohammad Rayani	
14.	Sekretariat Daerah Kota Bontang Syarifuddin	
15.	Biro Perekonomian Setda Nurindahwati Rahmayanti	

16.	Global Green Growth Institute (GGGI) Dyah Catur	
17.	Perusda Kelistrikan Nixson Butarbutar, SE., MBA	
18.	Bappeda Prov.Kaltim Ismi Maulida	